



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119  
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 218/HK/1999

Tentang

TIM PENDATAAN DAN PEMILAHAN ARSIP ORDE BARU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menkowsabngpan No. 197/MKu.WASPAN/5/1999 dan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat No. KN.20.1/56/1999 tentang Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru sebagai bukti keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Orde Baru, maka dipandang perlu dibentuk tim pendataan dan pemilahan Arsip Orde Baru di lingkungan Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 ;  
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat No. KN.20.1/56/1999 tgl. 2 Juni 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk tim pendataan dan pemilahan Arsip Orde Baru di lingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan tim sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tim bertugas untuk melakukan pendataan Arsip Masa Pemerintahan Orde Baru di lingkungan Universitas Mulawarman, dalam kurun waktu 1967-1998.

Ketiga : Tim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada surat Menkowsabngpan No. 197/MKu.WASPAN/5/1999 tanggal 6 Mei 1999 dan surat Kepala Arsip Nasional Wilayah Propinsi Kalimantan Barat No. KN.20.1/56/1999 tanggal 2 Juni 1999 dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di - ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda /h  
Tanggal : 17 Nopember 1999



Rachmad Hernadi, M.Sc  
1452

Salinan disampaikan Kepada : th.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala Arsip Nasional RI Wilayah Kalbar ;
6. Semua Unit dilingkungan UNMUJ..

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 218 /HK/1999 tanggal 17 Nopember 1999  
Tentang : Tim Pendataan dan Pemilahan Arsip Orde Baru di  
lingkungan Universitas Mulawarman  
~~~~~

Penasehat : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman  
Penanggung Jawab : Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan  
Ketua : Drs. Masjhari  
Sekretaris : Drs. I s m a n  
Sekretariat : 1. Drs. Moch. Zen  
2. Ita Noerwana, SE  
3. Mardiana  
4. Akhmadsyah

Anggota-Anggota :  
1. Rektorat : a. Umum, HTL dan Perlengkapan  
1. Drs. La Erita  
2. Drs. Maskan AF.  
3. Drs. Bungaran S.  
b. Kepegawaian  
1. Drs. H. Assan Said  
2. Hasnah  
3. Maria Toding Allo  
c. Pendidikan dan Kemahasiswaan  
1. Drs. Saleh Usman  
2. Drs. Hasan Basrie  
3. Drs. H. Zulkifli  
4. Dra. Rotua  
d. Perencanaan  
1. Drs. H. Irianto  
2. Subiantoro, SE  
3. Drs. Rizali Irawan  
2. Fakultas dan Lembaga:  
a. Fakultas Ekonomi  
1. Drs. Sofyan  
2. Agustinus Madi  
b. Fakultas Kehutanan  
1. Dra. Tiarma Siagian  
2. Rubingah  
c. Fakultas Pertanian  
1. Drs. Abidin Silalahi  
2. Yusransyah  
d. Fakultas KIP,  
1. Drs. La Musa  
2. Drs. Muhammad Yusuf  
e. Fakutas ISIPOL  
1. Drs. Irawansyah  
2. Isnawati

- f. Program S2 Kehutanan
  - 1. Drs. Halimin
  - 2. H.M. Syafi'i, S.Sos
- g. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
  - 1. Agustinus Tekko, SE
  - 2. Drs. Jauhari Effendi
- h. Lembaga Penelitian
  - 1. Dra. Masna Emiliana
  - 2. Baswedan, B.Sc.
- i. Perpustakaan
  - 1. Dra. Hj. Rafidhah Ilham
  - 2. Drs. Masjkur Alhadi

Disusun di : Samarinda  
Tanggal : 17 Nopember 1999



Rachmad Hernadi, M.Sc  
1 452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119  
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

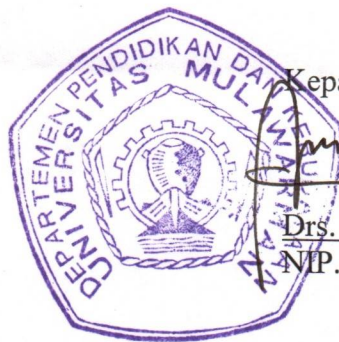
6 Desember 1999

Nomor : 698/J17.3/KM/1999  
Lampiran : 1 (satu) Exp.  
Hal : **Mohon Diterbitkan  
Surat Keputusan**

Kepada : Yth. Bapak Rektor  
Universitas Mulawarman  
di –  
**SAMARINDA**

Menindak lanjuti surat dari Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Napzaidis Universitas Mulawarman, No. 01/NAPZAIDS/XI/1999, tertanggal 30 Nopember 1999, perihal seperti pada pokok surat diatas, maka bersama ini kami mohon kiranya Bapak berkenan menerbitkan Surat Keputusan UKM NAPZAIDS dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir.

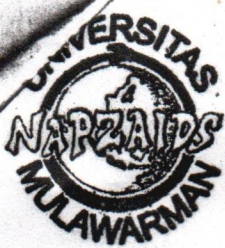
Atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.



Kepala BAAK-PSI,

*Masriani*  
Drs. Masriani

NIP. 130 537 859



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# UNIT KEGIATAN MAHASISWA NAPZAIDS UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 01 / / NAPZAIDS / XI / 1999  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Surat Permohonan

Yang kami hormati  
Bapak Rektor UNMUL  
di -  
Samarinda

Dengan hormat  
sehubungan dengan telah terbentuknya UKM baru yang membidangi masalah Narkotika, Psikiotropika, dan zat Adiktif serta HIV atau AIDS yang diberi nama UKM NAPZAIDS. Maka dengan ini kami memohon Kepada Bapak untuk membuat surat keputusan sebagai legalitas organisasi.  
Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 30 November 1999

Ketua Umum  
  
Handi Asmaradinata  
97.13072.01132.02

Sekretariat : Kampus FISIP UNMUL JL. muara muntai Telp. 43820 Samarinda 75118



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KEGIATAN MAHASISWA**  
**NAPZAIDS**  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

**SUSUNAN PENGURUS UKM NAPZAIDS PEIODE 1999 - 2000**

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat dan pembina : Pembantu Rektor III  
Ketua Umum : Handi Asmaradinata  
Ketua Bidang I : Petra  
Ketua Bidang II : Hendra  
Sekretaris Umum : Abdurahman  
Wakil Sekretaris : Jackson  
Bendahara : Ferry  
Wakil Bendahara : Pudith

Divisi – divisi

I. Jaringan Komunikasi dan data

Kepala Divisi : Rio Dedi Armanto  
Anggota : Hadi Harianto  
Suherman  
Hari Sudarmawan  
Asmaransyah

II. Pengabdian Masyarakat

Kepala Divisi : Didi hernadi  
Anggota : Darwis  
Irwan  
Kamarudin  
Alfianus Yoan samara  
Immanuel

III. Pendidikan latihan, Penelitian dan Pengembangan

Kepala Divisi : Sunggul Hasibuan  
Anggota : Thomas  
Rahmat Nur Abidin  
Rustam  
Adolfina Irma  
Windi Irawati

**IV. Medis , Rehabilitasi dan Konseling**

**Kepala Divisi : Gusti Hidayatullah**  
**Anggota : Nasri**  
**Siti**  
**Adam Preamble**  
**Dedi Yacob**  
**Arbiyati**

***Sekretariat : Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua Telp. 43820 Samarinda.***



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

Nomor : 4999 /J17/TU/1999

18 SEP 1999

Lampiran :

H a l : Mohon diterbitkan SK

Yth. : Rektor  
Universitas Mulawarman  
S A M A R I N D A

Sesuai dengan surat Kepala Arsip Nasional RI Wilayah Kalimantan Barat tentang permintaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru, terlampir kami sampaikan daftar tim Akuisi Arsip Nasional yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan pemilahan arsip orde baru dilingkungan Universitas Mulawarman.

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Rektor untuk dapat menerbitkan SK Tim tersebut.

Demikian atas perhatian Bapak Rektor kami ucapkan terima kasih.



An. Rektor  
Bantu Rektor II,

Wakmun Ali Badrun, M. Agr  
No. 514 885

TIM AKUISI ARSIP NASIONAL

=====

Penasehat : Pembantu Rektor II  
Penanggung jawab : Kepala Biro Adm.Unum Dan Keuangan  
Ketua : Drs. Masjhari  
Sekretaris : Drs. Isman  
Sekretariat :  
Anggota :

a. Bagian Umum HtL dan Perlengkapan

1. Drs. La Erita
2. Drs. Maskan AF.
3. Drs. Bungaran S.
4. Akhmasyah
5. Ita Noerwana
6. Mardiana
7. La Merenta
8. Fans
9. Sarno

b. Bagian Kepegawaian

1. Drs. H. Assan Said
2. Hasnah
3. Maria Tobing Allo

c. Bagian Pendidikan

1. Dra. Ratua
2. Antonius Allosarira

d. Bagian Perencanaan

1. Drs. H. Irianto
2. Subiantoro, SE
3. Drs. Madilau

e. Bagian Kemahasiswaan

1. Drs. Saleh Usman
2. I Gede Sudrma, S.Sos

d. Bagian TU Fekon

1. Drs. Sofyan
2. Drs. Agustinus Madi

f. Bagian TU Fahutan

1. Dra. Tiarma Siagian
2. Rubingah

g. Bagian TU Faperta

1. Drs. Abidin Silalahi
2. Yusransyah

h. Bagian TU FKIP

1. Drs. La Musa
2. Drs. Muhammad Yusuf

i. Bagian FISIPOL

1. Drs. Irawansyah
2. Isnawati

j. Bagian TU S2 Ilmu Kehutanan

1. Drs. Halimin
2. H.M. Syafi'i, S.Sos

k. Bagian TU LPPM

1. Agustina Tekko, SE.
2. Drs. Jauhari Effendi

l. Bagian Tu Lemlit

1. Dra. Masna Emiliana
2. Baswedan, B.Sc.

N. Bagian TU Perpustakaan



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Sutan Syahrir No. 17 Telp. (0561) 49180 / 49134

Pontianak, 2 Juni 1999

Nomor : KN.20.1/ 56 /1999  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Akuisisi Nasional  
Arsip Orde Baru

KEPADA

Yth. Rektor Universitas Mulawarman

di-

Tempat

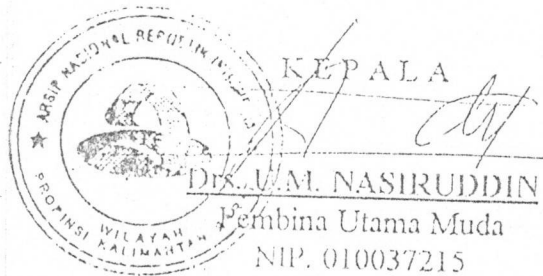
Menunjuk surat Menkowsabangan No. 197/MK.WASPAN/5/1999 tanggal 6 Mei 1999 perihal Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru yang juga ditujukan kepada para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan, Jaksa Agung RI, Gubernur Bank Indonesia, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Para Gubernur KDH Tk.I seluruh Indonesia (foto copy surat terlampir), maka untuk kelancaran dalam pelaksanaan akuisisi, baik dalam tahap persiapan, maupun pada tahap pelaksanaannya, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyclamatan dan pelestarian arsip Pemerintah Orde Baru adalah sangat penting bagi kepentingan Pemerintahan dan Pembangunan baik kini maupun yang akan datang, oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan Akuisisi Strategis secara Nasional terhadap arsip-arsip Orde Baru yang akan mencakup seluruh Instansi Pemerintah, baik di Tingkat I maupun di Tingkat II.
2. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan adalah Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-Badan Negara dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan dalam pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
3. Pelaksanaan Akuisisi Strategis dilakukan secara Nasional terhadap Arsip-arsip Orde Baru dalam tahun anggaran 1999/2000 - 2000/2002
4. Arsip Masa Pemerintahan Orde Baru yang akan diakuisisi meliputi kurun waktu tahun 1967 - 1998 baik berupa arsip kertas (surat, buku), foto, film, video atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelaksanaan kehidupan kebangsaan selama kurun waktu tersebut di atas.

5. Sambil .....

5. Sambil menunggu petunjuk pelaksanaan dari ANRI, diharapkan agar :
  - a. Menganggarkan dana untuk kegiatan akuisisi dimaksud pada Instansi masing-masing (termasuk jajarannya) untuk tahun 1999/2000 s/d 2001/2002.
  - b. Menunjuk petugas/Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan pemilahan Arsip Orde Baru di lingkungan masing-masing.
  - c. Mulai melakukan pendataan arsip Orde Baru terutama yang berkenaan dengan rumusan langkah kebijaksanaan yang telah diambil, keputusan yang bersifat pengaturaii, laporan tahunan serta hasil dari rapat dinas ataupun rapat staf pimpinan serta arsip lainnya yang dipandang perlu.
6. c Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut point 5 di atas kepada Arsip Nasional Wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan ucapan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Bapak Kepala ANRI di Jakarta



MENTERI NEGARA KOORDINATOR  
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN  
PENDAYA GUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 197/MK.WASPAN/5/1999  
Lampiran : --  
Perihal : *Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru*

Jakarta, 6 Mei 1999

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan
  2. Jaksa Agung Republik Indonesia
  3. Gubernur Bank Indonesia
  4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
  5. Para Gubernur KDH Tingkat I
- di  
Seluruh Indonesia

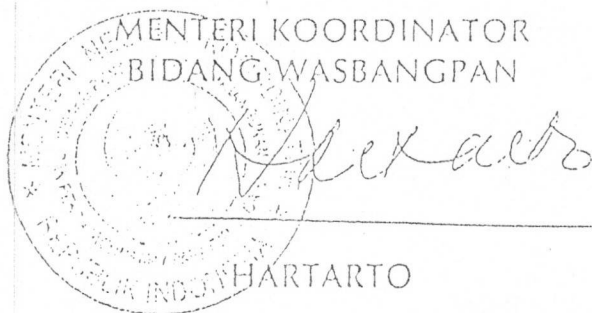
Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, dan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor KN. 20.1/246/1999 tanggal 30 Maret 1999 mengenai pentingnya penyelamatan dan pelestarian arsip, terutama arsip 32 tahun selama pemerintahan Orde Baru bagi kepentingan pemerintahan dan pembangunan masa kini dan yang akan datang, perlu dilakukan kegiatan akuisisi strategis secara nasional terhadap arsip-arsip Orde Baru yang akan mencakup seluruh instansi Pemerintah, baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah pada Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001/2002.

Pengertian Arsip menurut undang-undang tersebut di atas adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan dalam pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip-arsip itu perlu disimpan, diselamatkan dan dilestarikan di Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagai bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional, mengenai keberhasilan serta kegagalan Pemerintahan Orde Baru.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta kesediaan Saudara untuk :

1. Dalam waktu secepat-cepatnya mendata Arsip Masa Pemerintahan Orde Baru, kurun waktu tahun 1967 - 1998, di lingkungan instansi Saudara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah dan selanjutnya diberikan pengarahannya serta pemasyarakatan akan adanya kegiatan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru.
2. Pendataan atas arsip yang dimaksud mencakup jenis arsip, masalah, kurun waktu, dan jumlah arsip.
3. Arsip-arsip yang dimaksud bisa berupa arsip kertas, foto, film, video dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta pelaksanaan kehidupan kebangsaan selama kurun waktu tersebut.
4. Menempatkan petugas yang bertanggungjawab untuk melakukan pendataan dan pemilahan Arsip Orde Baru, dan hasilnya dilaporkan ke ANRI. Untuk itu hendaknya Saudara dapat melakukan koordinasi dengan ANRI dalam teknis pelaksanaan kegiatan ini.

Demikian untuk dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia  
(sebagai laporan).

*HSN-Akuisisi Nas. Arsip Orde Baru*